**PELAKSANAAN PENGAWASAN PENEMPATAN PAPAN REKLAME DI KOTA
PEKANBARU**

ANGI RISKY PANDIANGAN

PROF. DR. H. SUJIANTO M.Si

**FISIP Universitas Riau. Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru
28293**

Email: angirisky@yahoo.com

Abstrac : Monitoring the implementation of the placement of billboards in the city of Pekanbaru. This study aimed to determine how the implementation of surveillance placement billboard in the city of Pekanbaru. Qualitative descriptive study where data acquisition is done by snowball technique. Monitoring the implementation of the research results show the placement of billboards in the city of Pekanbaru is not going up, it is proved in ideally with no ad placement.

Keywords: *Billboards, Placement, Controlling*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang giat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang baik pusat maupun di daerah, walaupun dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kemunduran akibat krisis terutama krisis moneter. Oleh sebab itu pembangunan nasional indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional , maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari Pembangunan Nasional .

Pembangunan pada hakikatnya ialah mengubah keseimbangan baru, yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multi dimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yang dilakukan secara berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap memperhatikan permasalahan yang ada serta sistem pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam yang menjadi sarana untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan jaminan bagi kesejahteraan hidup di masa depan.

Dilihat dari pembangunan daerah saat ini bukan semata-mata hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, melainkan pemerintah pusat ikut serta dalam melaksanakan dan mewujudkan pembangunansesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan prinsip otonomi yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kekhususan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Maksud dan tujuan otonomi daerah secara tegas digariskan dalam GBHN adalah berorientasi pada pembangunan. Dimana merupakan kewajiban bagi daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah khususnya di daerah perkotaan dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan Penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi-transportasi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Guna memperlancar pertumbuhan dan perkembangan ataupun pembangunan di daerah perkotaan maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah .

Salah satu sumber penerimaan Negara adalah berasal dari pungutan pajak daerah .Pajak daerah merupakan aset pemerintah daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang no 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah (UU 22/1999), bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah, yaitu :
 1. Pendapatan pajak daerah
 2. Hasil restribusi daerah
 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Berdasarkan Pasal 79 UU 22/1999 tersebut, maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sesuatu yang diterima oleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-

lain pendapatan daerah yang sah. Dari beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, maka yang perlu mendapatkan perhatian adalah pajak dan retribusi daerah, karena kedua jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan membebani rakyat.

Di samping itu, ketentuan pasal 79 mengisyaratkan bahwa di dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah, kepada daerah kabupaten/kota diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber pendapatan daerah yang dimilikinya secara optimal, khususnya di era otonomi daerah saat ini dimana kewenangan pemerintah diserahkan secara luas dan nyata kepada daerah kabupaten/kota. Dengan kata lain diharapkan kepada daerah kabupaten/kota di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak selalu terus menerus menggaantungkan dana (anggaran) dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Pajak reklame adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi. Penempatan papan reklame di luar ruangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan di perkotaan karena media reklame tersebut sering kali memiliki orientasi lokasi pada jalan-jalan utama perkotaan yang memiliki keuntungan antara lain lokasi yang strategis, mudah dijangkau, aglomerasi kegiatan, kelengkapan sarana/fasilitas sosial dan ekonomi, serta kesiapan infrastrukturnya, sebagai akibat adanya keinginan untuk menonjol agar informasi yang disampaikan semakin efektif. Reklame dengan segala karakteristiknya secara visual memiliki kontribusi utama terhadap kesan suatu lingkungan.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang. Jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah, dan pengecualian lainnya sesuai dengan peraturan berlaku.

Kepentingan bagi pemerintah adalah penerimaan retribusi reklame yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga sering lebih mementingkan retribusi daripada keindahan kota, keamanan dan keselamatan lingkungan. Bagi pengusaha, reklame merupakan media promosi dari produknya, sehingga dari pemasangan reklame berharap produknya dikenal konsumen atau masyarakat luas. Untuk itu reklame dibuat sebesar mungkin (agar terlihat dan mudah terbaca), setinggi mungkin (agar dari jarak jauh sudah terlihat), dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (misalnya dipinggir jalan atau di atas jalan). Begitu juga dengan warna-warna dan penerangan yang dipakai agar reklame mencolok sehingga mendominasi pandangan sekitarnya.

Jenis-jenis pajak yang di pungut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 bab II pasal 2 terdiri dari:

1. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron dan sejenisnya.
2. Reklame kain.
3. Reklame melekat(stiker).
4. Reklame selebaran.
5. Reklame berjalan,termasuk pada kendaraan.
6. Reklame udara.
7. Reklame suara.
8. Reklame film/slide.
9. Reklame peragaan.

10. Reklame apung.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 72 tahun 2011 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam Bab I ketentuan umum pasal 1

(28) Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Vidiotron dan Elektronik Display.

(29) Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka sebelum membahas masalah-masalah tentang pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota Pekanbaru maka penulis akan mengungkapkan konsep teori yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut **Siswanto (2005:7)** mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di sistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat di simpulkan manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain. Dengan demikian manajemen adalah proses kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi.

Menurut **George R. Terry dalam Manullang (2008:3)** fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan (*planning*) merupakan suatu kegiatan dimana di dalam kegiatan ini terdapat proses pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan penuh keyakinan untuk mencapai hasil-hasil yang dikendaki.

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan factor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

3. Fungsi Penggerakan (*Actuating*)

Merupakan usaha agar semua kelompok yang melakukan untuk tercapainya tujuan dengan kesadaran dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlumelakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana

Dimana proses dari manajemen ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.

Menurut **Iskandar Kasim (2005:5)** pemanfaatan utama manajemen adalah untuk mengelola program kerja melalui proses-proses :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan perencanaan
- c. Pengawasan

Dimana proses yang ada dalam manajemen ini saling bekerja sama antara satu dan lainnya sehingga terwujud lah tujuan dari organisasi tersebut.

Proses pengawasan menentukan hasil pengawasan, oleh karna itu pengawasan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan keoptimalan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan berhubungan erat dengan perencanaan, rencana tidak akan berjalan dengan baik bila tidak ada pengawasan di dalam pelaksanaannya, dengan adanya pengawasan dapat dibandingkan hasil yang sedang dicapai dengan hasil menurut rencana. Pengawasan sangat diperlukan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang salah di dalam pelaksanaannya dengan maksud apa yang dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut **Henry Fayol dalam Inu Kencana (2006 :82)** pengawasan merupakan ketepatan dalam apapun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Selanjutnya proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu : pertama pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Dan yang kedua pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan (**Sondang P. Siagian, 2005 : 115**)

Perencanaan terutama berkaitan serta dengan pengawasan, seperti sudah dikatakan, perencanaan mengidentifikasi komitmen-komitmen terhadap tindakan-tindakan yang ditujukan untuk hasil-hasil masa yang akan datang. Pengawasan dilaksanakan untuk mengusahakan agar komitmen-komitmen tersebut dilaksanakan. Kegagalan pengawasan berarti cepat atau lambat adanya kegagalan perencanaan-perencanaan dan suksesnya perencanaan berarti suksesnya pengawasan.

Apabila pengawasan jelas menunjukkan bahwa perencanaan tersebut tidak diimplementasikan maka harus diperkembangkan sebuah rencana baru atau rencana yang dimodifikasi.

Prinsip pengawasan ialah pengawasan efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.

Menurut **Mokler dalam Siswanto (2006:139)** menyatakan pengawasan adalah pengawasan adalah suatu usaha sistemik untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain system umpan balik, informasi, membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dengan mengukur signifikansi penyimpangan.

Menurut **Rachmawati (2009:10)** pelaksanaan pengawasan mempunyai maksud sebagai berikut :

- a. Pengawasan merupakan aktivitas untuk menemukan. Mengkoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai, dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

- b. Tujuan dari pengendalian atau pengawasan adalah memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai

Sementara **Bohari** dalam **Tabroni (2012:28)** membagi macam teknik pengawasan sebagai berikut:

- a. Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan preventif ini bertujuan:

1. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang penyimpangan dari dasar yang telah ditentukan
2. Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien
3. Menentukan sarana dan tujuan yang akan dicapai
4. Menentukan kewenangan dan tanggungjawab sesuai instansi sehubungan dengan tugas yang dilaksanakan

- b. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan represif ini biasanya dilakukan dalam bentuk:

- a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungjawab disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi

Kemudian bohari menjelaskan mengenai sifat-sifat pengawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan preventif, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan.
- b. Pengawasan represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan didalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadinya pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan
- c. Pengawasan saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki
- d. Pengawasan berkala, adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala
- e. Pengawasan mendadak (SIDAK) adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik.
- f. Pengamatan melekat (WASKAT) adalah pengawasan yang dilakukan secara integrative mulai dari sebelum, pada saat dan sesudah kegiatan dilakukan.

Tindakan ini dilakukan bila pada fase sebelumnya dapat dipastikan terjadinya penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya menyimpang, agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditemukan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka :

- a. Pertama-tama haruslah dianalisis yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu
- b. Harus diketahui terlebih dahulu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu

- c. Bila sudah dapat ditetapkan dengan pasti sebab-sebab terjadinya penyimpangan baru diambil tindakan perbaikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer maupun sekunder melalui wawancara dengan informan penelitian untuk mendapat informasi tentang topik penelitian dan observasi ke lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di Kota Pekanbaru dilapangan, apakah sesuai dengan yang telah direncanakan kemudian dihubungkan dengan fenomena yang terjadi dan fakta dilapangan.

HASIL

Pelaksanaan pengawasan di lapangan oleh instansi yang bertanggungjawab terhadap suatu organisasi sangat berpengaruh dengan bagaimana perencanaan pelaksanaan pengawasan dan sejauh mana pelaksanaan pengawasan itu dilakukan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi yang telah di tetapkan sehingga memberikan hasil yang optimal terhadap perkembangan organisasi dan pelaksanaan strategi itu sendiri.

Dalam pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di Kota Pekanbaru ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu:

1. Menetapkan dalam bentuk fisik yang berupa :
 - A. Standar dalam bentuk fisik yang terdiri dari :
 - a. Kuantitas
 - b. Kualitas hasil produksi
 - c. Waktu
 - B. Standar dalam bentuk uang
 - a. Standar biaya
 - b. Standar penghasilan
 - c. Standar investasi
 - d. Standar intangible
2. Mengadakan penilaian (Evaluate)
Kegiatan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti :
 - a. Dari laporan tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin ataupun laporan istimewa
 - b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan atau bawahan dipanggil untuk memberikan laporannya
3. Mengadakan tindakan perbaikan (correction action)

PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pengawasan papan reklame di Kota Pekanbaru ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu :

1. Menetapkan alat pengukur (standar)

Dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai pelanggaran yang ada dimana standar ini di kenal sebagai sebuah ketentuan yang harus di ikuti,

ketentuan dan standar lah yang kemudian diadakan penilaian akan di ketahui mana yang salah dan benar dan selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Ketentuan yang harus di ikuti itu berupa Standar Operasional Prosedur (Standar Operating Procedure) untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah di tetapkan itu di jalankan terhadap peraturan yang telah di tetapkan.

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis,administratif dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.Tujuan Standar Operasional Prosedur adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang di kerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerinthan untuk mewujudkan good governance.Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan merupakan juga pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan di bidang pengawasan terhadap suatu objek yang bersangkutan.Standar operasional prosedur tidak hanya bersifat internal tetapi juga eksternal, karena standar operasional prosedur selain di gunakan untuk mengukur kinerja organisasi public yang berkaitan dengan ketetapan waktu juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi public di mata masyarakat berupa responsivitas,responsibilitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu unsur penting bagi Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota untuk mengawasi pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di Kota Pekanbaru. Pihak Dinas Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota selama ini dalam pengawasan penempatan papan reklame menggunakan Peraturan Walikota Pekanbaru No 72 Tahun 2011

a. Lokasi

Lokasi adalah titik tempat atau konstruksi dimana reklame diselenggarakan. Lokasi terbagi atas kelas jalan I, kelas jalan II, kelas jalan III, dalam ruang berjalan, megatron dan Jembatan penyebrangan Orang (JPO) atau bando jalan. Pembagian klasifikasi kelas jalan dijelaskan dalam Lampiran III peraturan walikota.

Mengingat tingkat nilai strategis yang berbeda maka penyelenggaraan reklame dalam ruang, reklame berjalan, reklame megatron dan reklame pada jembatan penyebrangan orang (JPO) atau bando jalan, skor lokasi dinyatakan secara khusus.

b. Sudut pandang.

Sudut pandang adalah arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dapat dipandang. Sudut pandang dibedakan berdasarkan jumlah arah lalu lintas di sekitar lokasi reklame salah satunya dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat dan lainnya. Sudut pandang terbagi atas: > 4 arah, 4 arah, 3 arah, 2 arah, 1 arah, dalam ruang, berjalan, megatron dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan.

c. Sudut pandang.

Sudut pandang adalah arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dapat dipandang. Sudut pandang dibedakan berdasarkan jumlah arah lalu lintas di sekitar lokasi reklame salah satunya dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat dan lainnya. Sudut pandang terbagi atas: > 4 arah, 4 arah, 3 arah, 2 arah, 1 arah, dalam ruang, berjalan, megatron dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan.

d. Bangunan

Dalam mendirikan papan reklame salah satu standart yang harus dilihat ialah bangunan reklame itu sendiri. Bangunan reklame harus dilihat dari konstruksi dan ukuran atau protipe sesuai dengan peraturan walikota no 24 tentang penyelenggaraan reklame di kota pekanbaru. Menurut perwako konstruksi bangunan harus kuat sehingga tidak membahayakan pengguna jalan. Bangunan reklame tidak dibenarkan berada dibahu jalan, trotoar dan kawasan pertamanan kecuali mendapatkan izin rekomendasi dari dinas terkait. Bangunan reklame yang berada diatas bangunan, tidak dibenarkan melebihi fasade atau dinding terluar bangunan.

2. Mengadakan Penilaian

a. Pengawasan preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan represif ini biasanya dilakukan dalam bentuk:

1. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungjawab disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. menempatkan papan reklame sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi

3. Mengadakan tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi . hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang sama. Perbaikan terhadap penyimpangan ini berupa:

a. Kordinasi

Salah satu bentuk perbaikan terhadap pengawasan penempatan papan reklame adalah dengan melakukan kordinasi antara Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru, Satpol PP kota Pekanbaru dan dinas pendapatan daerah kota pekanbaru. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kerjasama yang baik antar dinas terkait yang bertanggungjawab terhadap pengawasan dan penertiban papan reklame di kota Pekanbaru

b. Pemberian Sanksi

Bentuk perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pengawasan papan reklame. Sanksi ini diberikan langsung oleh Satpol PP Kota pekanbaru terhadap papan reklame yang menyalahi aturan dengan tujuan agar tidak ada lagi kesalahan yang sama dilakukan. Dimana sanksi yang diberikan apabila pihak penyelenggara papan reklame melakukan kesalahan akan dikenakan berupa teguran atau pembongkaran papan reklame.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan pengawasan dan penertiban papan reklame di kota pekanbaru, ditemukan beberapa factor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota pekanbaru. Adapun faktor – faktor tersebut adalah

1. Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi memiliki suatu manajemen untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen agar fungsi-fungsi manajemen yang lainnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam pencapaian suatu tujuan. Sarana untuk mencapai tujuan organisasi dan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai manajemen organisasi ialah sumber daya yaitu sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Sehingga kecukupan dan kekurangan dari sumber daya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan suatu pekerjaan. sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota Pekanbaru. sumber daya manusia dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota Pekanbaru ini ialah jumlah petugas atau personil dalam melaksanakan pengawasan penempatan papan reklame di kota Pekanbaru dan juga akan dapat dipengaruhi pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota Pekanbaru apabila terjadi kecukupan dan kelebihan sumber daya manusianya atau jumlah pegawainya.

2. Bentuk Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas tata ruang dan bangunan kota pekanbaru yang di lakukan secara langsung dan memiliki jadwal rutin dan teratur namun pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame masih belum maksimal sehingga masih banyak papan reklame yang belum memenuhi standart yang berlaku sesuai dengan peraturan walikota no 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota pekanbaru.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana atau prasarana merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame. Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan dalam melakukan penertiban atau pembongkaran papan reklame dibutuhkan alat atau sarana dan prasarana yang memadai

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Penempatan Papan reklame Di Kota Pekanbaru maka terdapat beberapa hal yang bisa peneliti jadikan kesimpulan dalam penulisan ini yaitu:

1. Pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota pekanbaru dilihat dari semua indikator mulai dari menetapkan alat pengukur, pelaksanaan pengawasan dan juga mengadakan tindakan perbaikan dapat dikatakan masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya papan reklame yang belum sesuai dengan standar yang telah di tetapkan dalam peraturan yang berlaku tentang penempatan papan reklame di Kota Pekanbaru.
2. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan penempatan Papan Reklame Di Kota Pekanbaru yang dilihat dari semua indikator mulai dari Sumber Daya Manusia, bentuk pengawasan dan Sarana dan Prasarana belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan sumber daya yang kurang memadai, seperti personil pengawasan dan penertiban yang kurang dan tidak sebanding dengan banyaknya papan reklame yang ada di pekanbaru dan masyarakat yang kurang bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota

Pekanbaru dalam melakukan pengawasan. Yang menjadi faktor sangat penting dalam melakukan pengawasan dan penertiban ini adalah faktor sumber daya manusia, karena apabila biaya sudah ada dan masyarakat yang mendukung tetapi personil Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru tidak memiliki kecakapan dan tanggung jawab dalam bertugas maka tidak akan berjalan sesuai yang kita inginkan.

SARAN

Dari peneliti yang telah dilakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh pemerintah atau dinas terkait dalam meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan penertiban papan reklame di kota pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Agar Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan lebih intensif terhadap papan reklame di kota pekanbaru dan sebaiknya melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang masih dirasa kurang dalam melakukan pengawasan.
2. Sebaiknya Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan dinas yang terkait dalam mengatasi tata letak dan penempatan perizinan papan reklame di kota Pekanbaru.
3. Agar Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru lebih selektif dalam pemberian izin papan reklame dan melihat kembali ke lapangan syarat dan tata letak papan reklame yang seharusnya.
4. Koordinasi antara pihak terkait mengenai pelaksanaan papan reklame di Kota Pekanbaru antara pihak Dinas Pendapatan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat lebih ditingkatkan kerjasamanya sehingga papan reklame di Kota Pekanbaru sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR RUJUKAN

H.B, Siswanto.2005, *Pengantar Manajemen*, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta
Kasim, Iskandar, 2005. *Manajemen Perubahan CV*. Alfabeta. Bandung

Kencana, Inu. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta
Manullang M. 2008. *Dasar-dasar Manajemen Yogyakarta*: UGM Press

Rachmawati. 2009. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta. Erlangga
Siagian, Sondang.P.2005. *Fungsi-fungsi Manajerial Edisi Revisi*. Bumi Aksara, Jakarta
Sugiyono.2006.*Metode Penelitian Ilmiah*. Alfabeta, Bandung